

Template Komitmen OGP

Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	Mengembangkan dan Mempromosikan Program Review (metode evaluasi program) yang sesuai dengan Konteks Indonesia sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas sosial di desa dan kabupaten.		
Deskripsi Singkat Komitmen	Program Review merupakan metode/pendekatan untuk melakukan evaluasi atas program-program pemerintah baik program fisik maupun pemberdayaan yang menekankan pada partisipasi masyarakat. Di dalam Program Review masyarakat yang terpilih sebagai Warga Penilai mengambil keputusan secara langsung atas keberlangsungan program yang dievaluasi. Apakah program akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Yayasan Tifa berkomitmen untuk memperkenalkan, mengujicobakan, dan mengimplementasikan Program Review di Indonesia.		
Pengusul Komitmen	Yayasan Tifa		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	BAPPEDA Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Guwosari Kabupaten Bantul, Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kabupaten Bantul	Atmawidya Alterasi Indonesia,	Japan Initiative
Jangka Waktu	1 tahun/ 12 bulan (dengan potensi perpanjangan)		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

- Evaluasi program pemerintah baik yang sifatnya pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat masih jarang diselenggarakan secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat. Pemerintah di berbagai level masih terfokus pada mengerjakan evaluasi-evaluasi yang sifatnya administratif dan teknokratis. Pada metode evaluasi klasik yang kerap digunakan tersebut pun jarang yang menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan (kedaulatan), mereka lebih hanya dijadikan sebagai sumber data semata sedangkan analisis dan pengambilan keputusan

<p>dilakukan konsultan, pejabat, yang seringkali pengetahuannya akan situasi di lapangan terbatas pada data yang mereka peroleh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya transparansi yang bermakna dari pemerintah kepada masyarakat/publik. Di tingkat desa/kalurahan (untuk konteks DI Yogyakarta) sebagian besar pemerintah desa telah melakukan upaya untuk mewujudkan transparansi, salah satu yang umum dijumpai adalah publikasi anggaran desa melalui baliho-baliho yang ditempatkan di ruang-ruang publik desa. Namun praktik-praktik ini terkadang baru mewujudkan transparansi satu arah, belum kemudian ada ruang atau kesempatan warga untuk kemudian mengkritisi secara langsung atau berdiskusi informasi yang tertera pada baliho-baliho tersebut. Tentu, tidak ingin menihilkan upaya-upaya lain yang dilakukan dengan mengoptimalkan ruang-ruang diskusi warga juga telah ada, namun efektivitas diskusi melalui pertemuan/rembug warga ini belum optimal. Pertemuan-pertemuan ini sering menjadi media penjarangan aspirasi yang tentu patut diapresiasi, namun pengambilan keputusan seringkali kembali pada elit-elit desa atau dilakukan secara tertutup. - Permasalahan transparansi dan akuntabilitas di level kabupaten atau pemerintahan yang lebih tinggi tentu lebih kompleks dengan luasan wilayah geografis dan jumlah penduduk yang jauh lebih besar. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang membutuhkan partisipasi langsung masyarakat tentu membutuhkan sumber daya yang lebih besar.
<p>2. Apa penyebab permasalahan tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi masih terjebak pada aspek procedural dan teknokratis. - Masyarakat dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan sehingga pihak ketiga seperti konsultan dianggap lebih berkompentensi untuk menentukan arah suatu program atau pembangunan.

Deskripsi Komitmen
<p>1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?</p> <p>Usulan komitmen ini merupakan kelanjutan dari komitmen RAN OGI 2020-2022, komitmen 4. Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat</p> <p>Pada tahun 2020 hingga 2022 Yayasan Tifa telah berhasil melakukan sosialisasi dan uji coba Program Review di tingkat desa di Kalurahan Sriharjo dan Kalurahan Guwosari di Kabupaten Bantul. Dari proses uji coba tersebut diperoleh berbagai poin pembelajaran baik bagi upaya pengembangan Program Review, maupun pembelajaran bagi pembangunan desa khususnya pada evaluasi pembangunan.</p> <p>Dari uji coba Program Review, diperoleh beberapa temuan yang penting untuk dijadikan catatan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketiadaan proses evaluasi yang komprehensif di tingkat desa selama ini menyebabkan program-program yang dilaksanakan cenderung menjadi rutinitas tahunan. Proses penyusunan program pun belum dilaksanakan dengan mempertimbangkan latar belakang masalah maupun tujuan akhir dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam proses Program Review ini muncul kesadaran akan pentingnya perencanaan pembangunan yang komprehensif dan terdokumentasi. - Upaya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan hingga evaluasi yang telah dilakukan selama ini masih belum sepenuhnya inklusif, dimana pelibatan masyarakat masih berdasarkan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga akuntabilitas sosial yang hendak tercapai pun belum terwujud. Pada Program Review, partisipasi masyarakat didorong dengan metode random sampling sehingga masyarakat yang selama ini tidak pernah mengikuti proses perencanaan pembangunan desa menjadi terlibat untuk

<p>pertama kali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melalui Program Review diharapkan proses siklus pembangunan (perencanaan-evaluasi) dapat terintegrasi dengan lebih baik dan dilaksanakan secara inklusif. Sehingga program atau kegiatan yang berulang/rutin, yang kurang efektif, kurang tepat sasaran dapat dikaji. Di sisi lain, Program Review mampu menjadi mekanisme untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
<p>2. Solusi apa yang diusulkan?</p> <p>Implementasi Program Review di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo. Uji coba Program Review di Kabupaten Bantul.</p>
<p>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas program pemerintah. - Peningkatan efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan program pemerintah.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?	Dengan Program Review pemerintah akan mempublikasikan dan menyampaikan program-program yang akan dievaluasi kepada masyarakat hingga detail terkecil. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat meliputi: rencana program, anggaran, realisasi kegiatan, realisasi anggaran, capaian, Analisa, dll. Semua ini disampaikan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun lisan.
2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?	Dalam Program Review selain adanya transparansi dari sisi pemerintah, masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritikan, masukan secara langsung kepada pemerintah. Di sisi lain, Program Review menempatkan masyarakat secara langsung sebagai pengambil keputusan akhir/pembuat keputusan atas keberlanjutan program, apakah program akan dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan/perubahan, atau program dihentikan sama sekali karena tak lagi sesuai.
3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?	Pada komitmen ini akan dikembangkan suatu mekanisme/metode untuk masyarakat dapat melakukan pegnawasan atas tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap hasil dari pelaksanaan Program Review.

Perencanaan Komitmen (Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)					
Ukuran Keberhasilan	Output yang Diharapkan	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan		
Adanya peraturan di tingkat desa yang mendukung dan mengesahkan pelaksanaan Program Review.	Terintegrasinya Program Review di dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran serta pembangunan di Kalurahan Guvosari dan Sriharjo.	Januari 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan Tifa		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
				Atmawidya Indonesia	Alterasi
Adanya minimal 2 program yang dilaksanakan pemerintah kalurahan di tahun 2022 yang direview menggunakan metode Program Review.	Tindak lanjut pemerintah kalurahan atas hasil pelaksanaan/keputusan yang diperoleh dari Program Review.	Juni 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan Tifa		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
				Atmawidya Indonesia	Alterasi
Terlaksanakannya pelatihan pendampingan teknis persiapan uji coba Program Review di Kabupaten Bantul (Program Review di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul).	Staff pemerintah Kabupaten Bantul mampu melaksanakan Program Review di tahun 2023 untuk mengevaluasi sejumlah program di tahun 2022.	Maret 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan Tifa		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
				Atmawidya Indonesia	Alterasi
Terlaksananya uji coba Program Review di Kabupaten Bantul.	Tindak lanjut pemerintah kalurahan atas hasil pelaksanaan/keputusan yang diperoleh dari Program Review.	Juni 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan Tifa		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
				Atmawidya Indonesia	Alterasi
Terselenggaranya	Program Review diketahui	September 2023	Penanggungjawab Utama: Yayasan Tifa		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		

seminar/webinar publik hasil Prorgam Review di Kalurahan Guwosari dan Kalurahan Sriharjo, serta uji coba Program Review di Kabupaten Bantul.	oleh lebih banyak masyarakat maupun berbagai level pemerintah di Indonesia,		K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
				Atmawidya Indonesia Alterasi	

